



ISSN 2685-483X

Volume 6, Issue 1, Januari-Juli 2024

Halaman 69-80



Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan melalui Pendidikan Politik Berbasis GEDSI

Elly Malihah¹, Siti Nurbayani¹, Siti Komariah¹, Lingga Utami¹, Rengga Akbar Munggaran², Arindini Ayu Kisvi Rizkia¹, Andreian Yusup¹, Faiq Akmal Fadhillah¹, Rexa Putra Pratama¹

¹Universitas Pendidikan Indonesia

²Universitas Indonesia

Kata Kunci	Abstrak
GEDSI Pendidikan Politik Perempuan	Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaksanaan program pendidikan politik berbasis <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) yang dilaksanakan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader penggerak perempuan ini adalah memberikan pemahaman mendalam pengetahuan dan keterampilan yang memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses advokasi politik. Melalui strategi yang bersifat partisipatif dan <i>bottom-up</i> , pendidikan politik berbasis GEDSI memberikan kader perempuan alat yang efektif untuk memperkuat kapabilitas mereka. Sebagai hasilnya, kader perempuan yang teredukasi secara holistik diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan.



ISSN 2685-483X

Volume 6, Issue 1, Januari-Juni 2024

Pages 69-80



Improving Female Cadres' Capacity Through Geds-i-Based Politics Education

Elly Malihah¹, Siti Nurbayani¹, Siti Komariah¹, Lingga Utami¹, Rengga Akbar
Munggaran², Arindini Ayu Kisvi Rizkia¹, Andreian Yusup¹, Faiq Akmal
Fadhillah¹, Rexa Putra Pratama¹

¹Universitas Pendidikan Indonesia

²Universitas Indonesia

Keywords	Abstract
GEDSI Political Education Women	The study aims to analyze the implementation of the Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) based political education program conducted in Antapani District, Bandung City, West Java Province. The research approach used is qualitative with a descriptive method. The data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, and literature study. The research findings show that the GEDSI-based political education for mobilizing female cadres provides a deep understanding of the knowledge and skills that facilitate their participation in the political advocacy process. Importantly, this education equips female cadres with practical tools to strengthen their capabilities. As a result, holistically educated female cadres are expected to play an active role in creating a more inclusive, democratic, and just political order.

Log Kegiatan Naskah

Pengiriman Naskah <i>Submission</i>	2023-12-10
Review	2024-05-12, 2024-05-20
Revisi <i>Revision</i>	2024-05-27
Naskah Diterima <i>Submission Accepted</i>	2024-05-29
Penerbitan <i>Publication</i>	June 2024

Pendahuluan

Di Indonesia, budaya patriarki menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik ataupun pemerintahan mengingat urusan politik dianggap “keras, kotor dan tidak pantas untuk perempuan”. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal lainnya yang menjadikan budaya patriarki melekat dalam ranah politik adalah, berbagai regulasi negara yang dianggap belum ramah gender dan cenderung bias gender (Zehav, 2018). Saat ini isu kesetaraan gender menjadi dominan dalam program pembangunan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan sebenarnya kian responsif gender. Representasi partisipasi perempuan terlibat dalam lingkup politik dianggap tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dipakai sebagai alat legitimasi saja (Nurchayyo, 2016).

Kader politik perempuan yang belum memiliki kapabilitas sehingga masih terjebak dalam asumsi kultural dan sosial. Di Indonesia, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender belum mencapai puncaknya, dan masyarakat masih terlibat dalam perdebatan tentang peran yang seharusnya dimainkan oleh perempuan (Suhada, 2021). Dengan kata lain, tantangan dan dinamika seputar kesetaraan gender masih menjadi isu yang relevan dan menjadi bagian dari perbincangan di tengah masyarakat. Sering kali perempuan dianggap sebagai kaum inferior yang mana dipersepsikan sebagai sosok feminin dan lemah lembut, sehingga dianggap tidak cocok mencalonkan diri sebagai pemimpin pada iklim organisasi (Nurbayani et al., 2019).

Pada hasil Pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) sebesar 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari keseluruhan anggota sebesar 575 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan target keterwakilan perempuan yang seharusnya 30% belum terlaksana secara efektif (Mazrieva, 2022). Penelitian Asmorojati (2019) juga mengungkapkan bahwa, perempuan yang menjadi kader politik terkesan hanya bentuk tindakan afirmatif dalam upaya pencapaian kuota 30% semata, di mana permasalahan pengetahuan dan keterampilan sebagai kader politik masih lemah. Sementara itu, penelitian Krook & Sanín (2020) juga mengungkapkan bahwa, keterlibatan perempuan dalam politik masih terbelenggu dalam kekerasan baik secara fisik, psikologi, seksual, hingga ekonomi. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam partisipasi politik baik secara struktural maupun kultural.

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai sebuah agenda yang dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa, berkenaan dengan menumbuhkan kesadaran mereka menjadi bagian dari warga negara. Peran pendidikan politik bagi perempuan menjadi salah satu akar yang dapat bermanfaat mengasah kemampuan perempuan agar mampu memberikan kontribusinya dalam tata kelola pemerintahan dengan baik. Menurut Sahu & Yadav (2018) sosiolog Amerika Burns, Schlozman, dan Verba menyatakan bahwa pendidikan adalah faktor kuat yang mempengaruhi partisipasi politik laki-laki dan perempuan di Amerika Serikat. Dengan demikian, adanya pendidikan politik bagi perempuan dengan pendekatan GEDSI dapat berperan secara langsung dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan komunikasi berguna untuk debat publik, dan pelatihan langsung dalam analisis politik melalui kursus dengan konten peristiwa terkini. Sedangkan, efek secara tidak langsungnya banyak dan termasuk manfaat sukarela dalam keterlibatan pada organisasi, mengembangkan keterampilan sipil kerja sama dan negosiasi, dan memperoleh birokrasi dan keterampilan organisasi yang berguna untuk kegiatan politik (Widiyaningrum, 2020).

Perlunya pendidikan politik bagi perempuan merupakan upaya dalam membangun sebuah nilai dominan kekuasaan yang terdiri dari indikator kesanggupan (*faculty*), kemampuan (*ability*), kepandaian (*skill*), dan kecakapan (*capacity*). Diharapkan dengan partisipasi perempuan dalam pendidikan politik dapat menjadikan perempuan tidak hanya dinilai secara partisipatif saja, tetapi perempuan memang memiliki kapabilitas terlibat dalam kontestasi politik (Wasi, 2020). Adanya partisipasi perempuan dalam politik dapat berkontribusi dalam upaya menciptakan ekosistem proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif, responsif, adil, inklusif, dan dapat memajukan status perempuan dengan

mengkatalisasi dampak jangka panjang yang luas (Varghese, 2020).

Urgensi pendidikan politik bagi perempuan dengan perspektif GEDSI merupakan salah satu upaya yang dinilai penting diberikan pada perempuan di Indonesia. Dengan adanya pendidikan politik ini, perempuan diharapkan lebih sadar akan hak-hak politik mereka, lebih aktif dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan, serta mampu memperjuangkan kepentingan mereka di berbagai tingkatan pemerintahan. Jangka panjangnya dengan adanya pendidikan politik dengan perspektif GEDSI akan membantu mengurangi kesenjangan gender dalam representasi politik dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Keterlibatan perempuan dalam politik, seyogyanya menjadi kesempatan yang cukup besar untuk terlibat secara aktif, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menetapkan batas minimal 30% untuk pengelolaan partai politik sebagai perempuan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur minimal batasan 30% untuk pengawasan setiap parpol adalah calon perempuan.

Menurut Pratiwi et al., (2022) pendekatan GEDSI menjadi bentuk pendekatan upaya untuk memastikan setiap individu dari semua latar belakang, termasuk perempuan dan orang-orang yang beragam gender, penyandang disabilitas dan orang-orang yang menghadapi bentuk lain dari marginalisasi, dapat mengakses, menggunakan, berkontribusi secara adil. Adanya pendekatan GEDSI digunakan untuk mencegah kerugian yang tidak diinginkan, pengucilan dan marginalisasi lebih lanjut dari kelompok berisiko, dan untuk mempromosikan hak-hak mereka, peluang dan manfaat yang adil (van der Vleuten & van Eerdewijk, 2020)

Dalam konteks pendidikan politik, pendekatan GEDSI memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh individu, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan, memiliki akses yang setara terhadap pengetahuan politik, proses pembelajaran, dan peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan kebijakan. Pendidikan politik seyogyanya sangat terkait dengan tujuan dalam pengembangan keterampilan partisipasi politik yang tidak hanya dikhususkan bagi laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Dalam hal ini pendekatan GEDSI menegaskan bahwa aspek kesetaraan pendidikan diperlukan guna pengembangan keterampilan partisipasi politik terutama yang tidak dipandang dari gender tertentu. Partisipasi politik dengan keterlibatan perempuan menjadi salah satu prasyarat mendasar bagi kesetaraan gender dan demokrasi saat ini. Menurut UN Women Asia and the Pacific (2019) studi menunjukkan jumlah perempuan yang lebih tinggi di parlemen umumnya berkontribusi pada perhatian yang lebih kuat terhadap isu-isu perempuan. Dengan demikian, implementasi pendekatan GEDSI juga menjadikan partisipasi politik perempuan sebagai salah satu pilar yang dapat menjadikan tata kelola pemerintahan lebih baik dan adil. Berdasarkan, uraian permasalahan di atas, pendidikan politik berbasis GEDSI telah menjadi fokus penelitian ini dengan tujuan menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kapasitas kader perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pendidikan politik GEDSI dapat memberdayakan kader perempuan, meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu GEDSI.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Aspers & Corte (2019) penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada penelaahan masalah yang akan mengkaji sebuah interpretasi terhadap sebuah masalah sosial. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan kader perempuan perkotaan terkait pendidikan politik berbasis *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Informan pada penelitian ini merupakan kader perempuan perkotaan yang terdiri dari 10 informan, di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan Kecamatan Antapani sebagai fokus penelitian ini, karena Kecamatan Antapani merupakan

salah satu kecamatan yang memiliki representatif sebagai area perkotaan dengan karakteristik khusus yang relevan dengan penelitian ini. Keberagaman karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Antapani dapat memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang bagaimana pendidikan politik berbasis GEDSI diimplementasikan, sehingga dapat mempengaruhi kader perempuan. Informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan politik mereka. Memilih kader perempuan yang aktif dalam kegiatan advokasi politik akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pendidikan politik terhadap partisipasi mereka sebagai agen masyarakat.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur terkait pendidikan politik. Wawancara mendalam dilakukan selama tiga bulan dimulai bulan September hingga November tahun 2023, yang bertujuan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi kader perempuan terkait implementasi pendidikan politik dan GEDSI. Observasi partisipatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang kegiatan pendidikan politik yang diikuti oleh kader perempuan. Dan terakhir, studi literatur dilakukan terhadap materi pendidikan politik dan kebijakan terkait GEDSI.

Teknik analisis data yang muncul dari wawancara dan observasi akan diidentifikasi dengan analisis *coding*. Menurut Mohajan & Mohajan (2022) teknik analisis *coding* dapat dikategorisasi menjadi tiga proses yang terdiri dari *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Penggunaan *coding* menjadi proses analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi konseptual dalam mengembangkan teori terkait kegiatan pendidikan politik berbasis GEDSI yang diikuti oleh kader perempuan perkotaan. Temuan merujuk pada bagaimana dampak pendidikan politik berbasis GEDSI pada peningkatan kapasitas kader perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan individu untuk memahami visi dan strategi politik. Pendidikan politik harus dapat memberdayakan individu untuk berperan aktif dalam memotivasi kesadaran akan supremasi politik dan dinamika politik. Sebagai upaya sadar, pendidikan politik bertujuan membangun kesadaran politik masyarakat, yang pada dasarnya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Dauletova et al., 2022) *the underrepresentation of women in the political sphere remains unchanged. Using the case of the Sultanate of Oman, this paper endeavors to analyze the reasons behind the persistent political disempowerment of women in the Middle East and North African region through the lens of public opinion. The findings are based on 288 surveys conducted with two groups of participants – a group of undergraduate and postgraduate students majoring in political science, and a group of Omani citizens with no political education. These findings confirm the impact of both formal (government driven. Sejalan dengan hal tersebut, Bila melihat definisi Pendidikan Politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Maka pendidikan politik sering dianggap sebagai bagian dari politik sosialisasi yang dilakukan agar setiap orang menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam kehidupan politik.*

Berbicara mengenai penerapan GEDSI tidak hanya dianggap sebagai aspek fundamental dari hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga sebagai prasyarat untuk meningkatkan proses pembangunan secara keseluruhan. Keterlibatan setara dari semua individu, termasuk mereka yang berada dalam kelompok berisiko seperti manula, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, dianggap krusial untuk mencapai lembaga pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (Fatonie et al., 2022). Kesetaraan partisipasi ini dianggap sebagai kunci untuk meraih potensi penuh masyarakat dalam membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Penerapan GEDSI mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak dasar. Dengan memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, masyarakat dapat mencapai efektivitas dan keadilan dalam lembaga pemerintahan. Kesetaraan partisipasi

juga membuka pintu bagi kontribusi yang beragam dan berdaya saing dari seluruh lapisan masyarakat, menciptakan fondasi untuk inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan (Anduiza et al., 2019) emotional, and moral components, and that they have the potential to narrow socioeconomic gaps in participation. Using survey data from nine European countries, our results show that populist attitudes are positively related to expressive non-institutionalized modes of participation (petition signing, online participation and, in some contexts, demonstrating. Oleh karena itu, GEDSI bukan hanya menjadi agenda hak asasi manusia, tetapi juga menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di semua tingkatan masyarakat.

GEDSI menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan proses pembangunan dengan mengadopsi komitmen terhadap prinsip “*leaving no one behind*” (Rahmadhani & Sholeh, 2021). Dalam implementasinya, penerapan GEDSI perlu mengeksplorasi potensi serangan balik dan penolakan dari pemegang kekuasaan, risiko dan bahaya yang dihadapi oleh perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok terpinggirkan, termasuk kekerasan dan pengucilan. Selain itu, GEDSI juga harus mempertimbangkan potensi risiko dalam memelihara atau memperkuat ketidaksetaraan yang dapat menjadi norma kekerasan dan pengucilan. Dengan melakukan analisis GEDSI, suatu kegiatan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, sehingga memungkinkan perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok terpinggirkan untuk berpartisipasi, mempengaruhi, dan memimpin kegiatan tersebut secara inklusif (Umboh et al., 2022).

Pendidikan Politik berbasis *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) diperkenalkan dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan yang “sensitif GEDSI”. Pendekatan sensitif GEDSI ini mencakup upaya untuk menyadari dan mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin dihadapi oleh kelompok tertentu dalam akses terhadap sumber daya, perlindungan, dan kesempatan. Selain itu, hal ini juga melibatkan evaluasi dampak program dan kebijakan terhadap kelompok-kelompok tersebut, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan dan program. Menurut Malihah et al., (2023) dengan menggunakan pengetahuan dari analisis GEDSI, sebuah kegiatan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek dengan pendekatan yang tidak merugikan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok terpinggirkan. Pendidikan politik berbasis GEDSI dirancang untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap kader perempuan dapat belajar, berkontribusi, dan memimpin tanpa menghadapi hambatan yang tidak adil. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya tentang pencegahan ketidaksetaraan, tetapi juga tentang memberdayakan setiap individu agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam dinamika politik dengan adil dan merata.

Partisipasi politik perempuan dan tata pemerintahan yang baik, dinilai dapat memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif, responsif, adil dan inklusif. Proses menganalisis informasi tentang konteks pendidikan politik berbasis GEDSI ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dan sumber daya pembangunan ditargetkan secara efektif dan adil, dan bahwa setiap dampak negatif dari intervensi pembangunan dapat terjadi pada perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok yang terpinggirkan, atau pada hubungan gender, berhasil diantisipasi dan dihindari. Perempuan sejatinya memegang peranan penting dalam pembangunan politik (Shabnam, 2019). Perempuan bukan objek tapi subjek politik yang mana perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki - laki. Namun nyatanya keterlibatan perempuan dalam politik hingga kini masih belum ideal. Peran perempuan menjadi sebuah representasi demokrasi yang mencakup dimensi inklusi, pengakuan perempuan, serta komitmen kesetaraan gender. Salah satu pilar kerja UN Women adalah memajukan partisipasi politik perempuan dan tata pemerintahan yang baik, untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif, responsif, adil, dan inklusif. Upaya difokuskan melalui titik masuk strategis yang dapat memajukan status perempuan dengan mengkatalisasi dampak jangka panjang yang luas.

Demokrasi tidak hanya sebatas berbicara regulasi sebagai prosedur untuk mengamankan representasi kelompok seperti perempuan dan minoritas melalui kuota, tetapi juga

berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan itu sendiri (Alonso & Lombardo, 2018.) Oleh karena itu, demokrasi yang adil gender perlu didukung regulasi yang ramah gender. Kebijakan demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Demokrasi inklusif tidak hanya sebatas memberikan kesempatan formal bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik, melainkan juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong perempuan untuk berperan secara aktif dan berdampak positif dalam pembuatan keputusan (Behl, 2019). Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan dukungan infrastruktur yang memfasilitasi partisipasi mereka.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi kader perempuan bertujuan untuk menumbuhkan dan membentuk kesadaran politik. Pendidikan politik diarahkan pada upaya agar setiap individu menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Westheimer dan Kahne (2004) menyoroti fokus pendidikan politik dalam memahami bagaimana sistem demokrasi pemerintahan beroperasi, mengajarkan bagaimana kelompok kepentingan mengejar tujuan mereka, serta menganalisis proses kekuasaan dalam berbagai institusi politik, ekonomi, dan lainnya. Dengan demikian, pendidikan politik perempuan menjadi instrumen penting untuk menciptakan partisipan yang sadar dan berkompeten dalam konteks kehidupan politik (Veugelers & Groot, 2019). Dalam konteks kader perempuan, pendidikan politik bukan hanya tentang memahami proses demokrasi, tetapi juga tentang memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kader perempuan dalam membentuk arah kebijakan, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan keadilan gender. Pendidikan politik perempuan memungkinkan kader perempuan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan serta aspirasi perempuan dalam berbagai konteks politik. Sebagai instrumen transformasi, pendidikan politik perempuan menjadi landasan bagi partisipasi yang bermakna dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perempuan dalam ranah politik dan sosial.

Dalam proses pendidikan politik aspek edukasi menjadi fokus pembentukan pengetahuan bagi kader perempuan. Hal ini memiliki peran penting dalam mendorong kontribusi perempuan dalam mengadvokasi regulasi kebijakan yang setara dan demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan politik bagi kader perempuan diharapkan dapat memperkuat kapabilitas perempuan yang mendukung prinsip demokrasi dan menjauhkan diri dari praktik politik yang bersifat tidak etis (Sahu & Yadav, 2018). Harapannya kader perempuan inilah yang dapat berperan sebagai mediator yang menyuarakan aspirasi keputusan politik yang adil untuk semua pihak. Dengan demikian, pendidikan politik perempuan menjadi kunci untuk memperkuat peran perempuan dalam konteks politik yang demokratis dan beretika. (Wahyuni et al., 2022). Prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik yang diimplementasikan pada kader perempuan diharapkan mampu memimpin dengan integritas, menyuarakan kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi secara berkelanjutan dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini bukan hanya tentang memberdayakan perempuan secara individu, tetapi juga membentuk agen perubahan yang dapat memperkuat fondasi politik yang adil dan inklusif.

Pelaksanaan pendidikan politik pada kader perempuan perlu mengedepankan pemberian pengetahuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengarah pada pengembangan keterampilan praktis. Pengetahuan dan keterampilan praktis ini menjadi kunci dalam memberikan strategi politik yang relevan untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan dan kemandirian perempuan dalam partisipasi mereka dalam kontestasi politik. Dengan pemahaman mendalam tentang isu-isu gender dan keadilan sosial, kader perempuan yang terlibat dalam program ini dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun jaringan kolaboratif, memobilisasi dukungan masyarakat, dan mengadvokasi kebijakan yang bersifat inklusif dan merata. Pentingnya pendidikan politik yang tidak hanya bersifat teoritis semata tetapi juga praktis dalam menciptakan kader perempuan yang handal dan berkompeten tidak boleh diabaikan. GEDSI telah membuktikan bahwa investasi dalam pengembangan keterampilan praktis dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam partisipasi dan kontribusi perempuan dalam kehidupan politik. Program ini menjadi contoh inspiratif

tentang bagaimana pendidikan politik dapat menjadi motor penggerak kemajuan menuju masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.

Selain itu, program ini juga memberikan peluang bagi kader perempuan untuk mengembangkan keberanian dan kemampuan berbicara di forum publik. Dengan demikian, mereka dapat lebih percaya diri dalam menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka, membuka pintu bagi dialog yang lebih inklusif dalam proses pengambilan keputusan politik. Keberanian dan kemampuan berbicara yang dikembangkan oleh kader perempuan melalui program ini bukan hanya berdampak pada partisipasi individu mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif secara keseluruhan. Dengan meningkatnya keterlibatan kader perempuan dalam forum publik, tercipta ruang diskusi yang lebih pluralistis dan mencerminkan keberagaman pandangan dalam masyarakat (Asmorojati & Muhammadiyah, 2021).

Dalam konteks pengambilan keputusan politik, kehadiran kader perempuan yang percaya diri membuka jalan untuk perwakilan yang lebih adil. Mereka dapat secara efektif menyuarakan aspirasi dan pandangan kelompok-kelompok yang mungkin sebelumnya kurang terwakili atau diabaikan dalam proses kebijakan. Hal ini tidak hanya merangsang dialog yang lebih inklusif, tetapi juga menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan berdaya tahan terhadap perubahan (Dauletova et al., 2022) the underrepresentation of women in the political sphere remains unchanged. Using the case of the Sultanate of Oman, this paper endeavors to analyze the reasons behind the persistent political disempowerment of women in the Middle East and North African region through the lens of public opinion. The findings are based on 288 surveys conducted with two groups of participants – a group of undergraduate and postgraduate students majoring in political science, and a group of Omani citizens with no political education. These findings confirm the impact of both formal (government driven. Kader perempuan mampu memberikan kontribusi yang berharga terhadap identifikasi solusi yang komprehensif untuk tantangan sosial. Mereka tidak hanya menjadi representasi, tetapi juga agen yang mendorong kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan beragam masyarakat. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses ini, kader perempuan memainkan peran kunci sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan, menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Program pendidikan politik GEDSI bukan hanya sekadar membekali kader perempuan dengan keterampilan individu, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi pemimpin yang mampu memimpin perubahan menuju masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan. Keberanian mereka untuk berbicara dan menyuarakan aspirasi menjadi pendorong penting untuk memperkuat esensi demokrasi sebagai wadah bagi semua suara dalam menciptakan kebijakan dan mengarahkan arah pembangunan masyarakat (Finnemore & Jurkovich, 2020). Ketika perempuan memegang peran utama dalam proses pembuatan keputusan politik, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan keberagaman dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif perempuan bukan hanya tentang pemberian suara, melainkan juga mengenai kontribusi substansial terhadap pembentukan kebijakan yang adil dan inklusif. Kader perempuan tidak hanya diberdayakan secara individu, tetapi juga diarahkan untuk memahami peran strategis mereka dalam membentuk *landscape* politik yang lebih demokratis. Dalam konteks inilah keberanian mereka untuk berbicara dan menyuarakan aspirasi menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif dan mengarahkan pembangunan masyarakat menuju arah yang lebih berkeadilan (Dolan et al., 2021).

Dukungan melalui pematerian pendidikan politik perempuan menjadi elemen penguatan yang memberikan *capacity building* saat terlibat dalam arena politik. Materi pendidikan politik yang disusun khususnya dapat memberikan kemampuan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis dan adil. Menurut Novianti et al., (2022) pentingnya partisipasi partisipatif dan proses *bottom-up* dalam perancangan dan implementasi program pendidikan politik perempuan menegaskan perlunya pendekatan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengintegrasikan partisipasi partisipatif dalam perancangan program pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader perempuan berarti mengakui keberagaman pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi yang dimiliki oleh perempuan dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kader perempuan untuk menjadi agen perubahan yang aktif dan memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan solusi atas tantangan-tantangan yang mereka hadapi.

Pendekatan pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader perempuan yang diimplementasikan secara formal, seperti melalui sosialisasi dan forum diskusi, memiliki peran penting dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada perempuan. Pendekatan *grassroot* dalam pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader perempuan menjadi alat dan strategi yang menjadikan proses tersebut berorientasi secara *bottom-up*. Pendekatan *grassroot* ini memberikan wadah untuk pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan secara tidak langsung di dalam komunitas (Ponce et al., 2020). Pendekatan *bottom-up* yang melibatkan kader perempuan secara langsung, memungkinkan pendidikan politik berbasis GEDSI ini menjadi lebih terkait dengan realitas dan kebutuhan, serta memberikan kesempatan untuk lebih efektif membangun pengetahuan advokasi politik di tingkat komunitas.

Kesimpulan

Pendidikan politik memiliki peran integral dalam pengembangan kemampuan individu untuk memahami visi dan strategi politik. Pentingnya kesadaran politik dalam masyarakat menjadi fokus utama, dengan pendidikan politik sebagai alat untuk membentuk partisipan yang bertanggung jawab. Penerapan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dianggap sebagai prasyarat untuk meningkatkan proses pembangunan secara menyeluruh, dengan keterlibatan setara dari semua individu di semua tingkatan sebagai kunci keberhasilan. Pendidikan politik bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan kesadaran yang memotivasi individu untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. GEDSI menjadi kerangka kerja yang memastikan bahwa pendidikan politik mencapai inklusivitas dan mengakui keragaman individu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, pendidikan politik berkontribusi pada mewujudkan partisipasi yang setara dan membentuk individu sebagai agen perubahan yang memahami serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Kesadaran politik yang ditanamkan melalui pendidikan menjadi pondasi bagi masyarakat yang lebih terinformasikan, terlibat, dan memiliki kapasitas untuk membentuk masa depan politik yang inklusif dan adil.

Program pendidikan politik berbasis GEDSI bagi kader perempuan harus mampu mengartikan materi secara memberdayakan, memungkinkan perempuan untuk mengaktualisasikan peran mereka secara terbuka. Mengakui perbedaan perspektif antara perempuan dan laki-laki, setiap komponen materi pendidikan politik perempuan diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator yang mempersiapkan perempuan untuk memiliki kapabilitas mengungkapkan pandangan mereka dalam konteks advokasi kebijakan yang adil dan demokratis. Implementasi pendidikan politik perempuan, terutama yang berbasis GEDSI, menjadi instrumen vital untuk menciptakan partisipan yang sadar, berkompeten, dan memiliki kapabilitas untuk berperan dalam politik. Pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperoleh dari pendidikan politik perempuan diharapkan dapat memberdayakan perempuan dalam kontestasi politik. GEDSI juga menjadi landasan bagi pendidikan politik perempuan dalam menciptakan kegiatan yang inklusif, menghindari dampak negatif, dan memfasilitasi partisipasi aktif dari kelompok-kelompok terpinggirkan. Melalui pendidikan politik, terutama yang berorientasi GEDSI dan *bottom-up*, diharapkan perempuan dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan politik perempuan dapat menjadi sarana untuk memberdayakan, menciptakan kesetaraan, dan mempromosikan keadilan dalam dinamika politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Alonso, A., & Lombardo, E. (2018). Gender equality and de-democratization processes: The case of Spain. *Politics and Governance*, 6(3), 78–89. <https://doi.org/10.17645/pag.v6i3.1419>
- Anduiza, E., Guinjoan, M., & Rico, G. (2019). Populism, participation, and political equality. *European Political Science Review*, 11(1), 109–124. <https://doi.org/10.1017/S1755773918000243>
- Asmorojati, A. W. (2019). The Urgency of Political Education to Women in the Perspective of Muhammadiyah and Democracy. *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*.
- Asmorojati, A. W., & Muhammadiyah, F. (2021). Law, Politics, and Women: How were 'Aisyiyah's Cadres Involved in the Party? *Varia Justicia*, 17(1), 19–40. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.4573>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Behl, N. (2019). *Gendered Citizenship: Understanding Gendered Violence in Democratic India*. Oxford: Oxford University Press.
- Dauletova, V., Hassan, H., & Hussain, Y. Z. (2022). Political Empowerment of Women and the Mediating Role of Political Awareness: The Case of Oman. *Journal of International Women's Studies*, 23(1).
- Dolan, J., Deckman, M. M., & Swers, M. L. (2021). *Women and Politics: Paths to Power and Political Influence*. Washington: Rowman & Littlefield.
- Fatonie, I., Wulandari, P. R., & Prasetiamartati, B. (2022). Enhancing the Use of Evidence by Policymakers in Indonesia. In J. C. Hertz, P. R. Wulandari, & B. Prasetiamartati (Eds.), *Knowledge System Development: Insights From Indonesia and International Applications*. RTI Press.
- Finnemore, M., & Jurkovich, M. (2020). The Politics of Aspiration. *International Studies Quarterly*, 64(4), 759–769. <https://doi.org/10.1093/isq/sqaa052>
- Krook, M. L., & Sanín, J. R. (2020). The Cost of Doing Politics? Analyzing Violence and Harassment against Female Politicians. *Perspectives on Politics*, 18(3), 740–755. <https://doi.org/10.1017/S1537592719001397>
- Malihah, E., Nurbayani, S., Komariah, S., Utami, L., Munggaran, R. A., Rizkia, A. A. K., Yusup, A., Fadhillah, F. A., & Pratama, R. P. (2023). Community-Based Social Capital: The Key to Inclusive Political Initiatives from Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Perspective. *JPIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 32(2), 165–182. <https://doi.org/10.17509/jpis.v32i2.63273>
- Mazrieva, E. (2022). *Partai Terapkan Kultur Patriarkis, Realisasi Kuota 30 Persen Perempuan di DPR Terhambat*. <https://www.konde.co/2022/02/kultur-partai-hambat-realisasi-kuota-30-persen-wakil-perempuan-di-dpr.html/>
- Mohajan, D., & Mohajan, H. K. (2022). Exploration of Coding in Qualitative Data Analysis: Grounded Theory Perspective. *Research and Advances in Education*, 1(6), 50–60. <https://doi.org/10.56397/rae.2022.12.07>
- Novianti, S., Noor, N. N., Romi, Ellen, & Raudhia, S. (2022). Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Upaya Mengatasi Marginalisasi Gender Dalam Pemerintahan. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 12(1), 43–57.
- Nurbayani, S., Komariah, S., Nurohim, S., & Nurhizky, D. (2019). Women's Leadership as Top Management in Educational Institution: Society Construction and Cultural

- Dilemma. *2nd International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2018)*, 258, 311–314. <https://doi.org/10.2991/icream-18.2019.65>
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(1), 25–34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Ponce, A. F., Scarrow, S. E., & Achury, S. (2020). Quotas, women's leadership and grassroots women activists: Bringing women into the party? *European Journal of Political Research*, 59(4), 867–885. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12382>
- Pratiwi, A., Jaetuloh, A., Handayani, A. P., Tamyis, A. R., Wulandari, A. S., Primadata, A. P., Tsaputra, A., Ambarwati, A., Arina, Rahmawati, B., Wardhani, K. K., Chazali, C., Devika, D. A., Sari, D. K., Afrianty, D., Mariana, D., Widiyanto, D. J., Oceani, D. N., Widyarningsih, D., ... Susilo, W. (2022). *Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Rahmadhani, R., & Sholeh, B. (2021). Improving Justice and Security in Indonesia: The Role of Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). *Global Focus*, 1(2), 103–116.
- Sahu, T. K., & Yadav, K. (2018). Women's education and political participation. *International Journal of Advanced Education and Research*, 3(6), 65–71.
- Shabnam. (2019). Political Participation and Representation of Women in Indian Politics. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies (JHSSS)*, 1(5), 153–160.
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v3i1.42>
- Umboh, P., Suryahadi, A., Aisyiah, N., Adelia, T., Widimulyani, S., & Djafar, T. N. (2022). Bringing Think Tanks Closer to Policymakers for Evidence-Informed Policymaking. In J. C. Hertz, P. R. Wulandari, & B. Prasetiamartati (Eds.), *Knowledge System Development: Insights From Indonesia and International Applications*. RTI Press.
- UN Women Asia and the Pacific. (2019). *Political Participation of Women*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/political-participation-of-women>
- van der Vleuten, A., & van Eerdewijk, A. (2020). The Fragmented Inclusion of Gender Equality in AU-EU Relations in Times of Crises. *Political Studies Review*, 18(3), 444–459. <https://doi.org/10.1177/1478929920918830>
- Varghese, T. (2020). Women's Political Participation and Leadership in India: Examining the Challenges. *Public Policy and Administration: Research Journal*, 19(1), 111–125.
- Veugelers, W., & Groot, I. de. (2019). Theory and Practice of Citizenship Education. In F. Oser & W. Veugelers (Eds.), *Moral Development and Citizenship Education* (pp. 14–41). Brill.
- Wahyuni, S., Khaerati, R., Julianita, J., & Muliasari, N. (2022). Women and Politics in the Perspective of Feminism and Gender Equality in Indonesia: A Case in Makassar. *SSRN Electronic Journal*, 4(2), 9–18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4035937>
- Wasi, I. (2020). *Politik, Partai Politik, Dan Perempuan Frontstage And Backstage Sebuah Catatan*. Deepublish.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 14(2), 126–142.
- Zehav, O. (2018). Becoming-woman, becoming-child: A joint political programme. In R. Rosen & K. Twamley (Eds.), *Feminism and the Politics of Childhood: Friends or Foes?* (pp. 241–256). UCL Press.